



Analisis pengetahuan masyarakat tentang program JKN - KIS (BPJS) di Daerah Binjai Utara Kelurahan Cengkeh Turi

Mutiara Rizki¹, Mira Ulpayani Harahap², Fani Dwi Yanti³, Fitriani Pramita Gurning⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹mutiararizky0505@gmail.com, ²miraulpayani99@gmail.com, ³fanidwiyanti@gmail.com, ⁴fitriani.gurning@uinsu.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

5 Februari 2023

Disetujui :

15 Februari 2023

Dipublikasikan :

25 Februari 2023

ABSTRAK

Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat tentang program JKN. Metode penelitian kualitatif deskriptif etnografi dengan metode wawancara kepada masyarakat sekitar dan observasi dan menambahkan beberapa kuesioner sebagai penambah keakuratan. Dari hasil pembahasan dan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang program JKN dan bagaimana itu bpjs dan manfaat dari BPJS dan bagaimana metode pembayaran bagi yang mandiri dan bagaimana cara daftar BPJS. Dan ada Sebagian masyarakat yang kadang sudah ikut membayar dan tidak membayar lagi dan masyarakat tidak mengetahui Tindakan apa yang harus dilakukan apakah terus membayar atau tidak perlu membayar lagi karena dari sisi masyarakat mereka belum pernah mendapatkan pelayanan dari BPJS karena belum pernah berobat kepuskesmas ataupun rumah sakit terdekat. dan dari hasil wawancara dapat kami simpulkan pengetahuan sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap pelayanan BPJS.

Kata kunci: Pengetahuan masyarakat; Program JKN – KIS (BPJS); Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Kesehatan; Rumah sakit

ABSTRACT

National Social Security (SJSN). This national social security system is administered through a mandatory social health insurance mechanism based on Law No. 40 of 2004 concerning the national social security system. The purpose of this research is to find out how the public knows about the JKN program. To increase accuracy, the ethnographic descriptive qualitative research method employs interviews with the surrounding community and observation, as well as a number of questionnaires. From the results of the discussion and research, it can be concluded that there are still many people who do not know about the JKN programme, how it is BPJS, the benefits of BPJS, what payment methods are available for those who are independent, and how to register for BPJS. And there are some people who sometimes have already paid and don't pay anymore, and the people don't know what action to take, whether they continue to pay or don't need to pay anymore, because from the community side, they have never received services from BPJS because they have never been treated at the health centre or the nearest hospital, and from the results of the interviews, we can conclude that knowledge greatly influences the public's view of BPJS services.

Keywords : *Community knowledge; JKN – KIS Program (BPJS); National Social Security (SJSN); Health; Hospital*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap manusia. Dimana kesehatan ini kunci produktifitas manusia. Manusia dapat menjalankan berbagai macam aktivitas hidup dengan baik pula. Kondisi fisik yang sehat dan segar akan berpengaruh pada produktifitas dan efektivitas kegiatan manusia (Ardianto, Dewi Anggraini, 2020). Masalah kesehatan merupakan hal yang perlu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun dari kalangan masyarakat, karena permasalahan kesehatan merupakan hal yang sangat penting jika masyarakat mengalami permasalahan kesehatan maka Indonesia juga akan merugi, dan ini akan berdampak pada pembiayaan disuatu negara, maka dari itu pemerintah harus lebih teliti dan lebih peduli tentang kesehatan masyarakat karena banyak sekali permasalahan kesehatan diindonesi tidak dapat ditangani oleh pemerintah karena kurangnya kepedulian pemerintah dalam

menegakkan program kesehatan dalam melakukan atau membuat kebijakan dalam program kesehatan terutama di program jkn dimana dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan dan mewajibkan Pemerintah untuk membangun sistem dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan penyelenggaraan program jaminan sosial. Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dalam undang-undang.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Instruksi Presiden, 2017). Hal ini menandakan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Artinya seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan (Yaqin, 2019). Manfaat dari JKN adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (Apriani, 2019). Dalam program ini masih banyak masyarakat yang kurang paham bagaimana program jkn atau bpjs meskipun sudah terdaftar sebagai penerima bpjs atau yang pbi dan Sebagian masyarakat kadang tidak peduli tentang pembayaran bpjs yang mandiri masih banyak persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa membayar bpjs hanya untuk menguntungkan pemerintah dan akan merugikan masyarakat. Mereka akan rugi jika membayar biaya bpjs. Sehingga sebagai seorang anggota atau masyarakat, sudah seharusnya mendapatkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan mudah dijangkau yang disosialisasikan oleh pihak BPJS Kesehatan. Serta mendapatkan pula informasi mengenai rangkaian proses mendaftarkan diri sebagai pasien yang terdaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan di rumah sakit dan informasi lainnya (H. Putri, 2020). BPJS Kesehatan berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan dan informasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan juga menganut teknologi modern. Terobosan BPJS Kesehatan menunjukkan hal tersebut. Aplikasi seluler JKN meningkatkan layanan bagi peserta JKN—KIS (Krisdayanti, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Maryuni & Eka, 2019) menyatakan bahwa fakta bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, masih banyaknya masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang masih terbatas terhadap pentingnya menjadi kepesertaan JKN-KIS. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Novya, 2017) yang menyatakan bahwa Peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Sukadana sebagian besar memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat tentang program JKN.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode penelitian kualitatif deskriptif etnografi dengan metode wawancara kepada masyarakat dan observasi dan menambahkan beberapa kuesioner sebagai penambah keakuratan atau berapa persen pengetahuan masyarakat tentang program JKN didesa binjai timur lingkungan V.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Sosial Nasional (JSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pemerintah Pusat, 2004). Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (N. E. Putri, 2014). Sistem pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk masyarakat secara umum ada dua yang pertama pada Rumah Sakit dan selanjutnya pada Puskesmas sehingga keduanya merupakan bagian dari sistem kesehatan maka diharuskan mampu untuk menciptakan keunggulan dalam memberikan pelayanan yang baik, misalnya keunggulan dalam berinovasi dan juga unggul dalam merespon kebutuhan pasien. Untuk menghadapi hal tersebut, salah satu cara yang harus dilakukan ialah dengan meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan. dimaksud dengan menjaga mutu ialah suatu program berlanjut yang disusun secara objektif dan sistematis memantau dan menilai mutu dan kewajaran asuhan terhadap pasien.

Focus kajian

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2013). Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Dari uu perpres No 12 tahun 2013 sudah dijelaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang telah membayar baik iuran PBI atau pun iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.

Dan dari penelitian yang kami lakukan di Binjai timur ada beberapa masyarakat yang masih kurang paham bagaimana program JKN itu berjalan dan ada juga beberapa masyarakat yang hanya membayar hanya diawal saja setelah itu mereka malas membayar karena mereka beranggapan bahwa mereka membayar tapi tidak menikmati pelayanan di puskesmas terdekat dan mereka juga beranggapan bahwa membayar hanya akan menghabiskan uang tanpa menikmati pelayanan di puskesmas dan banyak juga kami jumpai masyarakat yang malah takut saat kami wawancara, mereka merasa hanya kami yang diuntungkan dengan wawancara tersebut dan tidak jarang juga kami menemukan masyarakat yang sangat welcome terhadap kami contohnya pak kepling bapak kepling sangat senang mengatahui kami melakukan penelitian di daerah Binjai timur dan dari wawancara yang kami lakukan dengan bapak kepling kami yang membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang program jkn justru menemukan satu permasalahan yaitu adanya kartu bpjs yang datang dari pusat tapi orang tersebut ternyata sudah tidak bertempat tinggal di daerah tersebut, bapak kepling juga meminta bantuan apakah ada solusi dari permasalahan tersebut dan kami mengatakan kami akan memasukkan permasalahan ini ke penelitian kami pak siapa tau nanti akan ada solusi dari permasalahan tersebut.

Gambaran umum lokasi penelitian

Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 km² berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Batas area di sebelah Utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Binjai terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan dan 284 SLS/Lingkungan. Adapun komposisi dari setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Binjai Selatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan: Tanah Merah, Bhakti Karya, Tanah Seribu, Pujidadi, Binjai Estate, Rambung Barat, Rambung Dalam dan Rambung Timur
2. Kecamatan Binjai Kota terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan: Bergam, Satria, Tangsi, Kartini, Setia, Binjai, Pekan Binjai
3. Kecamatan Binjai Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan: Mencirim, Tunggurono, Dataran Tinggi, Timbang Langkat, Tanah Tinggi, Sumber Mulyorejo, Sumber Karya
4. Kecamatan Binjai Utara terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan: Pahlawan, Jatinegara, Nangka, Jati Makmur, Kebun Lada, Damai, Cengkeh Turi, Jati Karya, Jati Utomo
5. Kecamatan Binjai Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan: Bandar Senembah, Limau Mungkur, Limau Sundai, Payaroba, Sukamaju dan Sukaramai.

Geografi Kota Binjai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 30 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi $3^{\circ}31'40'' - 3^{\circ}40'2''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}27'3'' - 98^{\circ}32'32''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Binjai adalah berupa daratan seluas 90,23 km². Secara administratif, wilayah Binjai memiliki batas – batas area sebagai berikut : Utara : Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Timur : Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Selatan : Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Barat : Kecamatan Selesai Kab Langkat

Jenis kepesertaan bpjs

Tabel 1 Jenis Kepesertaan BPJS

No	Jenis kepesertaan jkn	Jumlah	%
1	Mandiri	24	24%
2	Pemerintah	64	64%
3	Tidak memiliki bpjs	12	12%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 24% masyarakat yang menggunakan jenis kepesertaan mandiri dan jenis kepesertaan dari pemerintah ada 64% dan yang tidak mempunyai bpjs/

Jenis kelamin

Tabel 2 Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	41	41%
2	Perempuan	59	59%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan hasil kuesioner yang kami buat kami mendapat responden sebanyak seratus orang dimana jumlah laki-laki 41 dan perempuan 59 orang.

Pendidikan Terakhir

Tabel 3 Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan terakhir	Jumlah	%
1	SD	15	15%
2	SMP	18	18%
3	SMA	56	56%
4	DIPLOMA III	1	1%
5	SARJANA	1	1%
6	MASIH SEKOLAH	4	4%

Dari jumlah responden yang kami buat kami mendapatkan hasil Pendidikan terakhir responden kami mulai dari SD sampai sarjana masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap jkn atau bpjs dan memandang nilai dari jkn tersebut.

Pembahasan

Dari hasil observasi, dan wawancara dan tambahan beberapa kuesioner didapatkan hasil masyarakat masih kurang mengetahui tentang program JKN dan kepesertaan BPJS meskipun 70% lebih masyarakat menggunakan BPJS baik secara mandiri maupun dari pemerintah masih banyak yang tidak mengetahui tentang program JKN dan menggunakan 100% bpjs untuk berobat baik itu ke puskesmas maupun kerumah sakit terdekat. Mereka kadang tidak menggunakan bpjs untung berobat melainkan malah melakukan pengobatan secara out of pocket dimana melakukan pembayaran secara mandiri mereka merasa bahwa dengan berobat menggunakan BPJS tidak akan mendapatkan pelayanan yang baik. Dan dari hasil wawancara yang kami lakukan ke beberapa rumah desa kami mendapatkan hasil bahwa Pendidikan sangat berpengaruh terhadap sikap dan tanggapan dari masyarakat orang yang berpendidikan tinggi lebih mengetahui apa itu program JKN dan apa saja manfaat dari BPJS dan bagaimana kinerja dari bpjs

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang program JKN dan bagaimana itu bpjs dan manfaat dari BPJS dan bagaimana metode pembayaran bagi yang mandiri dan bagaimana cara daftar BPJS. Dan ada Sebagian masyarakat yang kadang sudah ikut membayar dan tidak membayar lagi dan masyarakat tidak mengetahui Tindakan apa yang harus dilakukan apakah terus membayar atau tidak perlu membayar lagi karena dari sisi masyarakat mereka blum pernah mendapatkan pelayanan dari BPJS karena blum pernah berobat kepuskesmas ataupun rumah saki terdekat.dan dari hasil wawancara dapat kami simpulkan pengetahuan sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap pelayanan BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, H. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019. *Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sriwijaya.*
- Ardianto, Dewi Anggraini, S. (2020). Respon Pasien Pengguna Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rawat Inap Pada Pelayanan Puskesmas Poasia Kota Kendari. *Welvaart : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. <https://doi.org/10.52423/welvaart.v1i1.10829>
- Instruksi Presiden. (2017). *Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.*
- Krisdayanti, W. (2021). *Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan.*
- Maryuni, S., & Eka, A. (2019). Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Dalam Meningkatkan Partisipasi Kepesertaan Mandiri Bpjs Kesehatan Di Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1–15.
- Novya, L. (2017). Gambaran Pengetahuan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Sukadana Tahun 2016. *Jurnal Mahasiswa PSPD FK Universitas Tanjungpura*, 3(1).
- Pemerintah Pusat. (2004). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.*
- Putri, H. (2020). *Persepsi Masyarakat Kelurahan Amplas terhadap Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Putri, N. E. (2014). Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang. *Tingkap*, 10(2), 175–189.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* Bandung: CV Alfabeta.
- Yaqin, A. (2019). Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Mendukung Program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, Ganding). *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 1–20.